



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) CIANGIR KOTA TASIKMALAYA

¹Adelia Riani Putri, ²R. Rindu Garvera, ³Aditiyawarman

^{1,2,3} Jurusan Ilmu pemerintahan, Universitas Galuh

adelia_riani@student.unigal.ac.id

Accepted: September 2026; Published: September 2026; Available online: September 2026

ABSTRACT

Waste management at the Ciangir Final Waste Disposal Site (TPA) in Tasikmalaya City continues to face challenges, including an increase in waste volume, limited infrastructure, suboptimal implementation of sanitary landfill practices, and uneven stakeholder engagement. This study aims to analyze collaborative governance in waste management at the Ciangir Landfill in Tasikmalaya City using the Penta Helix model, which includes academia, the business sector, the community, the government, and the mass media. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that collaborative governance in waste management at the Ciangir Landfill has not yet functioned optimally overall. The mass media sector has performed optimally as it plays a role in disseminating information, shaping public opinion, and promoting transparency. Meanwhile, the academic sector, the business community, the public, and the government still face limitations, such as academic studies that have not yet been used as the basis for policy, the lack of formal cooperation with the business community, limited public participation, and constraints in terms of budget, vehicle fleets, heavy equipment, fuel, and personnel. This study indicates that strengthening collaborative governance requires improved cross-sectoral coordination, optimization of infrastructure, management of leachate treatment facilities, and follow-up on cooperation with the business sector.

Keywords: Collaborative Governance, Penta Helix, Waste Management, Ciangir Landfill.

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Kota Tasikmalaya masih menghadapi persoalan berupa peningkatan volume sampah, keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya penerapan sanitary landfill, serta belum meratanya keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir Kota

Tasikmalaya dengan menggunakan model *Penta Helix* yang meliputi akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media massa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir belum berjalan optimal secara keseluruhan. Sektor media massa menjadi aktor yang telah berjalan optimal karena berperan dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan dorongan transparansi. Sementara itu, sektor akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah masih menghadapi keterbatasan, seperti hasil kajian akademik yang belum menjadi dasar kebijakan, belum adanya kerja sama resmi dengan dunia usaha, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, serta keterbatasan anggaran, armada, alat berat, BBM, dan personel. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan *collaborative governance* perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sarana prasarana, pengelolaan IPAL air lindi, serta tindak lanjut kerja sama dengan dunia usaha.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Penta Helix, Pengelolaan Sampah, TPA Ciangir.*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah lingkungan yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak daerah di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah semakin meningkat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, bau tidak sedap, serta menurunnya kualitas lingkungan masyarakat. Pengelolaan sampah yang belum optimal sering kali berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta masih adanya pandangan bahwa sampah tidak memiliki nilai dan kegunaan (Rahayu, Pramitasari, & Ardiyansah, 2024). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memiliki fungsi yang signifikan sebagai tahap terakhir dalam sistem

pengelolaan sampah. Namun, dalam kenyataannya, TPA seringkali menjadi lokasi akhir penumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan lanjutan yang efektif. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap sampah yang telah dibuang di TPA, hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (Yudiyanto & Tania, 2019). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan melalui sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, tetapi juga harus difokuskan pada pengurangan sampah dari sumbernya, pemisahan, pemanfaatan kembali, dan pengelolaan akhir yang memperhatikan aspek lingkungan.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah. TPA Ciangir menjadi tempat pemrosesan akhir sampah utama di Kota

Tasikmalaya dan menampung sampah dari seluruh kecamatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dari 292,30 ton/hari pada tahun 2020 menjadi 334,88 ton/hari pada tahun 2024. Sementara itu, sampah yang terangkut ke TPA pada tahun 2024 tercatat sebesar 265,53 ton/hari, sehingga masih terdapat 69,35 ton/hari sampah yang tidak terangkut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan volume timbulan sampah.

Masalah pengelolaan sampah di TPA Ciangir tidak hanya disebabkan oleh volume sampah yang tinggi, tetapi juga karena fasilitas dan infrastruktur yang masih terbatas, penerapan sistem sanitary landfill belum optimal, serta keterlibatan para pemangku kepentingan belum merata. Implementasi sistem sanitary landfill di TPA sering kali mengalami masalah seperti kurangnya fasilitas, mesin berat, serta pengelolaan air lindi (Islami, Moelyaningrum, & Khoiron, 2023).

Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dijalankan sendirian oleh pemerintah saja. Pendirian pemerintahan kolaboratif sangat penting karena menekankan kerja

sama antara pemerintah dan pihak-pihak yang bukan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mengenai masyarakat. Dalam pemerintahan kolaboratif, lembaga publik mengajak pihak-pihak non-pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara bersama-sama yang dilakukan secara formal, mendalam, dan bertujuan mencapai kesepakatan bersama (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, pendekatan kerja sama harus digunakan dalam mengelola sampah karena masalah sampah memerlukan partisipasi dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Penelitian ini menggunakan model *Penta Helix* yang menekankan kolaborasi lima aktor utama, yaitu akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media massa. Kolaborasi lima pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang didukung oleh beragam sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis (Astuti et al., 2020). Model ini relevan digunakan untuk menganalisis pengelolaan sampah di TPA Ciangir karena setiap aktor memiliki peran strategis. Akademisi berperan dalam menyediakan dasar ilmiah dan rekomendasi kebijakan, dunia usaha berperan dalam dukungan investasi dan teknologi,

masyarakat berperan dalam partisipasi dan perubahan perilaku, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus koordinator, sedangkan media massa berperan dalam penyebaran informasi dan transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Kota Tasikmalaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi objek secara alami, di mana peneliti sendiri menjadi alat utama. Teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa cara sekaligus, dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada kesimpulan umum (Sugiyono, 2017). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pengelolaan sampah melalui *collaborative governance* di TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya secara rinci dan terpadu.

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data dasar didapat dengan cara mencari informasi langsung melalui wawancara dan pengamatan kepada orang yang dianggap tahu

dan terlibat dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir. Data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai data pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu memilih informan dengan dasar pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017).

Informan dalam penelitian ini ada lima orang, terdiri dari Kepala UPTD TPA Ciangir, dua orang warga yang tinggal atau melakukan kegiatan di sekitar TPA Ciangir, satu orang akademisi, serta satu orang dari media massa. Sektor dunia usaha masih dianalisis sebagai salah satu bagian dalam model *Penta Helix*, tetapi tidak dijadikan sumber informasi langsung karena berdasarkan hasil penelitian, belum ada kerja sama resmi yang berhasil tercapai antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan penulisan dokumen. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari orang yang ditemui tentang peran, hambatan, dan usaha dalam mengelola sampah. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data

dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

Teknik menganalisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan merangkum informasi yang penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk cerita naratif, sedangkan pembuatan kesimpulan dilakukan setelah data telah dianalisis dan diverifikasi. Proses analisis data dilakukan dengan melihat semua informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar temuan penelitian tetap sesuai dengan fokus penelitian (Abdussamad, 2021).

PEMBAHASAN

***Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari belum meratanya keterlibatan aktor *Penta Helix*. Dari lima sektor yang dianalisis, sektor media massa merupakan sektor yang telah berjalan optimal. Sementara itu, sektor akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah masih menunjukkan keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* berdasarkan lima dimensi *Penta Helix*, yaitu akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media massa.

Akademisi dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Akademisi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah melalui penyediaan dasar ilmiah, pengembangan inovasi berbasis penelitian, dan pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akademisi telah berperan dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir, khususnya melalui penelitian terkait air lindi dan kondisi lingkungan sekitar TPA.

Penelitian akademisi menjadi salah satu bentuk penyediaan dasar ilmiah dalam memahami dampak lingkungan dari aktivitas TPA. Kajian mengenai air lindi, kandungan logam, serta kondisi lingkungan sekitar TPA dapat menjadi bahan masukan bagi pihak pengelola TPA. Selain itu, akademisi juga memiliki potensi untuk memberikan inovasi, seperti penelitian terkait pengelolaan air lindi, keselamatan kerja pemulung dan petugas sampah, serta pengembangan green belt di kawasan TPA.

Namun, peran akademisi belum berjalan optimal. Hasil kajian akademisi masih bersifat masukan

dan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Akademisi juga tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan kebijakan, sehingga rekomendasi yang diberikan masih bergantung pada tindak lanjut dari pihak pemerintah atau pengelola TPA.

Dengan demikian, sektor akademisi telah berperan dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir, tetapi perannya masih perlu diperkuat agar hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan dapat lebih terstruktur serta menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Dunia usaha dalam model *Penta Helix* berperan sebagai mitra strategis dalam menyediakan dukungan investasi, sumber daya finansial, inovasi produk atau teknologi, serta keterlibatan operasional dalam program pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor dunia usaha belum terlibat secara nyata dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

Belum terdapat kerja sama resmi antara pemerintah daerah atau UPTD TPA Ciangir dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Dukungan investasi atau sumber daya finansial dari sektor dunia usaha belum berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA

Ciangir masih banyak bergantung pada pemerintah, terutama dalam hal anggaran, sarana prasarana, dan operasional.

Selain itu, inovasi teknologi dari dunia usaha juga belum diterapkan secara nyata. Pemerintah memang terbuka terhadap peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah seperti refuse derived fuel (RDF). Akan tetapi, kerja sama tersebut masih berada pada tahap peninjauan dan belum sampai pada pelaksanaan. Keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan operasional juga belum terealisasi, sehingga sektor ini belum memberikan kontribusi langsung dalam mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor dunia usaha menjadi salah satu aktor *Penta Helix* yang belum berjalan optimal. Padahal, keterlibatan dunia usaha dapat membantu pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek pembiayaan, teknologi, dan inovasi pengolahan sampah.

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam pengelolaan sampah karena masyarakat berperan sebagai penghasil sampah, pihak yang terdampak, sekaligus pihak yang dapat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan

sampah. Dalam model *Penta Helix*, masyarakat berperan dalam partisipasi program, penerima manfaat, serta perubahan perilaku yang mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir masih terbatas. Keterlibatan masyarakat lebih terlihat pada pemulung dan pelaku usaha barang bekas yang memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Pemulung berperan dalam memilah dan mengambil barang yang masih dapat dimanfaatkan, sedangkan pelaku usaha barang bekas membeli dan menjual kembali barang-barang yang masih memiliki nilai jual. Bentuk partisipasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pengurangan sebagian sampah yang masih bernilai ekonomi.

Namun, keterlibatan masyarakat sekitar TPA secara umum belum berjalan rutin. Masyarakat sekitar lebih banyak menjadi pihak yang merasakan dampak dari keberadaan TPA, seperti bau, penumpukan sampah, dan gangguan lingkungan. Manfaat kebijakan pengelolaan sampah juga belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu, seperti pemulung dan pelaku usaha barang bekas, sedangkan

masyarakat sekitar yang terdampak belum memperoleh manfaat yang jelas dan berkelanjutan.

Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal. Masih terdapat masyarakat yang membakar sampah rumah tangga karena belum adanya pengangkutan sampah yang rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga masih perlu diperkuat melalui sosialisasi, fasilitas pengangkutan, dan pelibatan masyarakat secara lebih terarah.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, manfaat belum dirasakan secara merata, dan perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah karena bertindak sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan fasilitator. Dalam konteks pengelolaan sampah di TPA Ciangir, pemerintah telah memiliki dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan daerah yang mengatur pengurangan dan penanganan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengarahkan pengelolaan TPA Ciangir menuju sistem controlled landfill dan mengembangkan fasilitas IPAL air lindi. Pemerintah juga telah menyediakan sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah, kontainer, petugas kebersihan, alat berat, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu kepada masyarakat serta memberikan fasilitas seperti biopori.

Namun, peran pemerintah belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi anggaran, sarana prasarana, alat berat, armada pengangkut, BBM, dan personel. Jumlah serta kondisi fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan menyeluruh, terutama karena kerja sama dengan sektor dunia usaha belum terealisasi secara signifikan.

Pemerintah sebagai koordinator utama perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh aktor *Penta Helix*. Keterlibatan akademisi, masyarakat, dunia

usaha, dan media massa perlu diarahkan dalam satu pola kerja sama yang lebih terstruktur. Tanpa koordinasi yang kuat, kolaborasi antaraktor akan berjalan secara terpisah dan tidak menghasilkan dampak yang optimal.

Dengan demikian, pemerintah telah menjalankan peran dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir, tetapi masih perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan *collaborative governance* dapat berjalan lebih efektif.

Media Massa dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Media massa memiliki peran penting dalam mendukung *collaborative governance* melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan peningkatan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa menjadi sektor yang telah berjalan optimal dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

Media massa telah berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai isu pengelolaan sampah, kondisi TPA, keluhan masyarakat, serta program pemerintah. Pemberitaan media membantu masyarakat mengetahui persoalan yang terjadi di TPA Ciangir. Selain itu, media juga berperan dalam membentuk opini publik terhadap pentingnya

pengelolaan sampah yang lebih baik.

Media massa juga mendorong transparansi karena dalam proses pemberitaan, media melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, DPRD, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya pemberitaan, pemerintah dan pengelola TPA terdorong untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.

Berbeda dengan sektor lainnya, media massa tidak menghadapi hambatan yang berarti dalam meliput isu pengelolaan sampah. Media masih dapat melakukan peliputan, meminta keterangan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, sektor media massa dapat dikatakan sebagai aktor *Penta Helix* yang telah berjalan optimal dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

Hambatan *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir menghadapi berbagai hambatan. Pada sektor akademisi, hambatan utama terletak pada keterbatasan kewenangan akademisi dalam menentukan kebijakan. Hasil kajian akademisi masih bersifat

masukan dan belum sepenuhnya menjadi dasar kebijakan.

Pada sektor dunia usaha, hambatan utama adalah belum adanya kerja sama resmi dengan pihak swasta, baik dalam bentuk dukungan investasi, teknologi, maupun kegiatan operasional. Kondisi ini menyebabkan sektor dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

Pada sektor masyarakat, hambatan terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat secara rutin, manfaat kebijakan yang belum dirasakan secara merata, serta belum adanya pengangkutan sampah rumah tangga yang teratur. Hal tersebut menyebabkan masih adanya kebiasaan membakar sampah di tingkat rumah tangga.

Pada sektor pemerintah, hambatan terlihat dari keterbatasan anggaran, sarana prasarana, alat berat, armada pengangkut, BBM, personel, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya melibatkan seluruh aktor secara berkelanjutan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* di TPA Ciangir belum berjalan secara sinergis.

Upaya Penguatan *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir

Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di TPA Ciangir. Akademisi telah melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pihak UPTD TPA Ciangir. Pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu, memberikan fasilitas biopori, melakukan pengurangan tanah secara bertahap, mengembangkan fasilitas IPAL, serta mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia.

Media massa juga berperan dalam memperkuat transparansi melalui pemberitaan yang berkaitan dengan isu pengelolaan sampah. Pemberitaan tersebut membantu masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan mendorong pemerintah untuk memberikan respons terhadap isu yang muncul.

Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan pelaksanaan *collaborative governance* karena kolaborasi antaraktor masih berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media massa dapat bekerja secara lebih sinergis.

Penguatan *collaborative governance* dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah

perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh aktor memiliki ruang untuk berkontribusi. Kedua, hasil penelitian akademisi perlu ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan. Ketiga, pemerintah perlu menindaklanjuti peluang kerja sama dengan dunia usaha, terutama dalam pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Keempat, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pengangkutan sampah rumah tangga yang lebih teratur, dan pelibatan warga sekitar dalam kegiatan kebersihan. Kelima, media massa perlu terus menjalankan peran dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mendorong transparansi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal secara keseluruhan. Dari lima sektor dalam model *Penta Helix*, sektor yang telah berjalan optimal adalah media massa. Media massa telah berperan dalam menyebarluaskan informasi, membentuk opini publik, dan mendorong transparansi mengenai pengelolaan sampah. Sektor akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah belum berjalan optimal.

Akademisi telah berperan melalui penelitian dan rekomendasi, tetapi hasil kajian belum sepenuhnya menjadi dasar kebijakan. Dunia usaha belum terlibat secara nyata karena belum terdapat kerja sama resmi dengan pihak swasta. Masyarakat sudah menunjukkan partisipasi melalui pemulung dan pelaku usaha barang bekas, tetapi keterlibatannya masih terbatas dan belum melibatkan warga sekitar secara rutin. Pemerintah telah berperan melalui kebijakan, koordinasi, dan penyediaan fasilitas, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran, armada, alat berat, BBM, sarana prasarana, dan personel. Hambatan pelaksanaan *collaborative governance* terlihat dari keterbatasan kewenangan akademisi, belum adanya kerja sama resmi dengan dunia usaha, rendahnya keterlibatan masyarakat secara rutin, manfaat kebijakan yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya pemerintah. Upaya yang telah dilakukan meliputi penelitian akademisi, keterbukaan pemerintah terhadap kerja sama, sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu, pemberian fasilitas biopori, pengembangan IPAL, optimalisasi sarana prasarana, dan pemberitaan media massa. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar kolaborasi antaraktor dapat berjalan lebih sinergis, terarah, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Syakir Media Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arsanti, V. (2012). *Pengelolaan sampah oleh masyarakat perkotaan di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

- Islami, R. R., Moelyaningrum, A. D., & Khoiron, K. (2023). Analisis sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 179-188.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Data Timbulan Sampah Kota Tasikmalaya. <http://sipsn.kemenlh.go.id/>. Diakses pada 8 November 2025.
- Marlina, E., et al. (2023). Pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13.
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi model *Penta Helix* dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55-63.
- Rahayu, R. D., Pramitasari, A., & Ardiyansah, A. (2024). *Collaborative governance* Pentahelix ABCMG+ dalam Pengelolaan Program Bank Sampah di Kota Bekasi. *REFORMASI*, 14(2), 257-270.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wargadinata, E. (2016). *Kepemimpinan Kolaboratif*. Sumedang: STIA LAN Press.
- Yudiyanto, E. Y., & Tania, A. L. (2019). *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*. Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Sai Wawai Publishing.